

ABSTRAK

Della Aprilia Imbar Sari, 12101183010, *Jual Beli Online dengan Pembayaran Tunda ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada ShopeePayLater)*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022, Pembimbing : Dr. Budi Kolistiawan, M.E.I

Kata Kunci: Jual Beli Online, ShopeePayLater, Fiqih Muamalah

Konteks penelitian ini memunculkan permasalahan baru bagi syariat Islam adalah semakin maraknya praktik jual beli *online* dengan sistem pembayaran tunda biasa disebut dengan “**Beli Sekarang Bayar Nanti**”. Praktik jual beli ini dilatarbelakangi oleh *marketplace* yang menciptakan aplikasi belanja *online* dengan pembayaran sistem tunda. Dalam Fiqih Muamalah dapat dikaji menggunakan beberapa akad, akad yang pertama yaitu akad *qard* dalam akad *qard* dijelaskan bahwa pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Memberikan pinjaman atau utang piutang memiliki nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah Swt. Akad kedua akad *ju'alah* yang membolehkan transaksi tersebut disebabkan adanya wasilah berupa barang, jasa dan aplikasi. Seolah, pihak konsumen melalui penyintas berupa aplikasi itu sedang bilang ke *provider*. “Aku sedang membeli barang/jasa ini, danaku kurang, tolong carikan aku utangan nanti kamu saya kasih 10% dari dana itu yang aku bayar dalam satu tahun”.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 bermuamalah dalam transaksi jual beli *online* secara normatif dapat diuraikan bahwa kecanggihan teknologi informasi dapat memunculkan banyak inovasi salah satunya dengan *fintech* adalah sebuah layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. *Fintech* yang mulai eksis dan lebih dikenal oleh masyarakat yaitu jenis *Peer to peer Lending* yaitu jenis *fintech P2P Lending* ini bergerak dibidang pinjaman uang, maka Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan telah mengeluarkan peraturan untuk transaksi *online* dengan selanjutnya disebut sebagai POJK LPMUBTI.

Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana praktik jual beli *online* dengan pembayaran tunda menggunakan *ShopeePayLater*? 2) Bagaimana praktik jual beli *online* dengan pembayaran tunda menggunakan *ShopeePayLater* ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 ? 3) Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli *online* dengan pembayaran tunda menggunakan *ShopeePayLater*?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif secara deskriptif (berupa kata-kata tulisan). Teknik pengumpulan data yang

digunakan berupa observasi wawancara dengan para pengguna *ShopeePayLater*, pihak *Shopee*, dosen muamalah, tokoh agama secara semi terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan untuk verifikasi. Sedangkan pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Praktik jual beli *online* dengan pembayaran tunda dalam *ShopeePayLater* di aplikasi *Shopee* dipraktikkan antara pembeli dengan penjual, dimana pembeli setuju membeli barang yang ditawarkan penjual di aplikasi *Shopee*, tetapi pembayaran dilakukan oleh pembeli dengan berhutang kepada pihak *ShopeePayLater* untuk membayar secara tunai kepada penjual, dengan kewajiban membayar secara angsuran kepada *ShopeePayLater* dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan angsuran, berupa pinjaman pokok dan tambahan berupa biaya admin sebesar 1%, biaya penanganan sebesar 2,95% dan biaya denda keterlambatan sebesar 5%. 2) Praktik jual beli *online* dengan pembayaran tunda menggunakan *ShopeePayLater* di aplikasi *Shopee* telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Khususnya Pasal 1 karena pembeli melakukan pemesanan barang kepada penjual melalui aplikasi *Shopee*, namun sebelumnya telah melakukan pengajuan penggunaan fitur *ShopeePayLater* dan telah disetujui, sehingga pembayaran atas pembelian barang sah dilakukan oleh *ShopeePayLater* dengan akad utang piutang dan pembeli setuju untuk membayar utang tersebut beserta bunganya kepada *ShopeePayLater*. 3) Ditinjau dari fiqih muamalah, jual beli *online* dengan pembayaran tunda dalam *ShopeePayLater* hukumnya haram karena merupakan akad *qard* yang mempersyaratkan tambahan pengembalian dari utang pokok sehingga termasuk riba *qardy*.

ABSTRACT

Della Aprilia Imbar Sari, 12101183010, Online Buying and Selling with Delayed Payments in terms of Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 and Fiqh Muamalah (Case Study on ShopeePayLater), Department of Sharia Economics Law, Faculty Of Sharia and Legal Studies, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2022, Supervisor : Dr. Budi Kolistiawan, M.E.I

Keyword: *Online Buying, ShopeePayLater, Muamalah Fiqh*

The context of this research raises a new problem for Islamic law, namely the increasingly practice of buying and selling online with a delayed payment system commonly referred to as "Buy Now Pay Later". This buying and selling practice is motivated by a marketplace that creates online shopping applications with delayed payment systems. In Fiqh Muamalah it can be studied using several contracts, the first contract, namely the qard contract, in the qard contract it is explained that giving assets to other people can be collected or reclaimed, or in other words lending without expecting anything in return. Giving loans or debts has a good value and is rewarded by Allah SWT. The second contract is the ju'alah contract which allows the transaction due to the presence of wasilah in the form of goods, services and applications. It's as if the consumer, through the survivor in the form of an application, is talking to the provider. "I'm buying these goods/services, I don't have enough funds, please find me a loan, I will give you 10% of the funds that I will pay in one year."

Based on the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016muamalah in online buying and selling transactions normatively it can be described that the sophistication of information technology can give rise to many innovations, one of which is fintech is a service in non-bank financial institutions that utilizes information technology as a tool for reach consumers. Fintech which is starting to exist and is better known by the public, namely the type of Peer to peer Lending, namely this type of fintech P2P Lending, is engaged in money lending, the Financial Services Authority, which has the authority to supervise and regulate financial institutions, has issued regulations for online transactions, referred to as POJK. LPMUBTI.

The research focus in this study is: 1) What is the practice of buying and selling online with delayed payments using ShopeePayLater? 2) How is the practice of online buying and selling online with delayed payments using ShopeePayLater in terms of the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016? 3) What is the review of muamalah fiqh on buying and selling online with delayed payments using ShopeePayLater?

The type of research used in this research is descriptive qualitative (in the form of written words). The data collection technique used is in the form

of interview observations with ShopeePayLater users, Shopee parties, muamalah lecturers, semi-structured religious leaders and documentation. The data analysis technique consists of three streams of activities that occur simultaneously, namely: data condensation, data presentation, drawing conclusions for verification. While checking the validity of the researcher's data using triangulation.

The results of this study indicate that: 1) The practice of buying and selling online with delayed payments in ShopeePayLater in the Shopee application is practiced between buyers and sellers, where buyers agree to buy goods offered by sellers in the Shopee application, but payments are made by the buyer in debt to ShopeePayLater to pay in cash to the seller, with the obligation to pay in installments to ShopeePayLater within a period of 3 months, 6 months, up to 12 months installments, in the form of principal and additional loans in the form of an admin fee of 1%, a handling fee of 2.95% and a late fee of 5%. 2) The practice of buying and selling online with delayed payments using ShopeePayLater in the Shopee application complies with the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing and Borrowing Services, in particular Article 1, because buyers order goods from sellers through the Shopee application, but previously submitted an application for the use of the ShopeePayLater feature and it was approved, so that payment for the purchase of legitimate goods is made by ShopeePayLater with a credit agreement and the buyer agrees to pay the debt along with interest to ShopeePayLater. 3) Judging from the muamalah fiqh, buying and selling online with delayed payments in ShopeePayLater is illegal because it is a qard contract that requires an additional return of the principal debt so that it includes usury qardy.

الملخص

ديل آفريليسا إمبار سارى، ٢٠١٢١، ٢٠٣٨١١٠، بيع الشراء عبر الإنترت مع دفع المبالغ المستردة التي استعرضتها لوائح هيئة الخدمات المالية رقم PJOK/٧٧٦٢٠٢/١٠. دراسة حالة المتسوق دفع الأخير)، قسم حكم الإقتصادية الشرعية، جامعة ولاية السيد علي رحمة الله الإسلامية، مشرف: بودى كوليسليوان، الماجستير

الكلمات الدالة: اشتري عبر الإنترت ، المتسوق دفع الأخير ، فقه معامله.

يشير سياق هذا البحث مشكلة جديدة للشرعية الإسلامية هي الممارسة المتزايدة الانتشار للشراء والبيع عبر الإنترت مع نظام دفع التأخير يشار إليه عادة باسم ”اشتر الآن ادفع لاحقاً“ . هذه الممارسة في البيع والشراء مدفوعة بالسوق الذي ينشئ تطبيقات تسوق عبر الإنترت مع دفع نظام تأخير. في فقه معامله يمكن مراجعته باستخدام العديد من الأكاد ، أول أكاد ، قرد أكاد في قرد أكاد ، أوضح أن إعطاء الممتلكات لآخرين يمكن فوترها أو طلب عودتها، أو بعبارة أخرى أقرض دون لمس المكافآت. إن تقسيم القروض أو الحسابات المستحقة له قيمة جيدة ومحاورة إلى جانب الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفصل الثاني من الذي يسمح أن تكون المعاملة ناجحة عن وجود السلع والخدمات والتطبيقات. كما لو أن المستهلك من خلال أحد الناجحين في شكل تطبيق يخبر المزود. ”أنا أشتري هذا العنصر ، وأنا أفتقر ، يرجى سحب لاحقاً ، أحب ١٠٪ من الأموال التي دفعتها في عام واحد“ .

بناء على لوائح هيئة الخدمات المالية رقم PJOK/٧٧٦٢٠٢/١٠ يمكن وصف الإبداع في عمليات البيع والشراء المعيارية عبر الإنترت أن تعقيد تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يجلب العديد من الابتكارات التي أحدها مع التكنولوجيا المالية هو خدمة في المؤسسات المالية غير المصرافية التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات على أنها أداة للوصول إلى المستهلكين. التكنولوجيا، التي بدأت في الوجود ومعروفة بشكل أفضل من قبل المجتمع ، نوع الإقراض من نظير إلى نظير، وهو نوع ينخرط الإقراض P2P من التكنولوجيا المالية في قرض نقدى ، ثم أصدرت هيئة الخدمات المالية التي لديها سلطة الإشراف على المؤسسات المالية وتنظيمها لوائح للمعاملات عبر الإنترت المشار إليها فيما يلي باسم POJK LPMUBTI.

تركز الأبحاث في هذه الدراسة على: ١) كيف ممارسة الشراء والبيع عبر الإنترت مع تأخير

المدفوعات باستخدام المتسوق دفع الأخير؟ ٢) كيف ممارسة الشراء والبيع عبر الإنترن特 مع دفع التأخير باستخدام المتسوق دفع الأخير تمت مراجعته من لوائح هيئة الخدمات المالية رقم PJOK/٧٧٠٢/٦١٠٢. ٣) كيف المراجعة فقه معاملة ضد الشراء والبيع عبر الإنترن特 مع دفع التأخير في الاستخدام المتسوق دفع الأخير.

نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة هو نوع وصفي. تقنية جمع البيانات المستخدمة هي في شكل مقابلات مراقبة مع مستخدمي المتسوق دفع الأخير و صوفى والماضى والشخصيات الدينية شبه المنظمة والوثائق. تتكون تقنيات تحليل البيانات من ثلاثة خطوط من الأنشطة التي تحدث في وقت واحد وهي: تكيف البيانات ، عرض البيانات ، ورسم الاستنتاج للتحقق. بينما التتحقق من صحة بيانات البحث يستخدم التثليل.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: ١) تمارس ممارسات البيع والشراء عبر الإنترنط مع مدفوعات التأخير في المتسوق دفع الأخير في تطبيق صوفى بين المشترين والبائعين ، حيث يوافق المشترون على شراء السلع التي يقدمها البائعون في تطبيق صوفى ، ولكن يتم الدفع من قبل المشتري عن طريق الدين إلى المتسوق دفع الأخير للدفع نقداً للبائع ، مع الالتزام بدفع أقساط إلى المتسوق دفع الأخير في غضون فترة تصل إلى ٣ أشهر و ٦ أشهر، حتى ١٢ شهراً من الأقساط ، في شكل قروض رئيسية وإضافية على شكل رسوم إدارية بنسبة ١٪ ، ورسوم مناولة بنسبة ٩٥٪ ورسوم متأخرة بنسبة ٥٪. ٢) توافق ممارسات البيع والشراء عبر الإنترنط مع دفع التأخير باستخدام المتسوق دفع الأخير في تطبيق صوفى مع لائحة هيئة الخدمات المالية رقم PJOK/٧٧٠٢/٦١٠٢. ٣) تمت المراجعة من فقه معاملة ، الشراء عبر الإنترنط مع تأخير الدفع في المتسوق دفع الأخير القانون هو حرام لأن القرظ مما يعني عوائد إضافية من الدين الرئيسي بحيث يتم تضمينها بالقرظ.